

BAB IV

ALASAN PENINGKATAN PEMBELIAN SENJATA ARAB SAUDI KE AMERIKA SERIKAT

Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara dengan kekuatan politik yang cukup berpengaruh dalam kancan politik Timur Tengah. Kedua negara ini mempunyai modal politik untuk mempengaruhi keadaan politik di kawasan kilang minyak tersebut. Namun demikian kedua negara ini memiliki hubungan yang tidak harmonis, terutama setelah meledaknya Revolusi Iran pada tahun 1979, sampai pada hari ini. Iran adalah negara dengan mayoritas Syiah (89%) sementara Saudi mayoritas penduduknya Sunni (95%). Ketidakharmisan hubungan kedua negara tersebut tidak terlepas dari aliran keagamaan dalam Islam.

Perseteruan kedua negara tersebut semakin terlihat setelah *The Arab Spring* bergejolak tahun 2011 lalu. Iran dan Saudi mengambil sikap yang berbeda dalam merespons peristiwa politik setelah tahun 2011 lalu, bahkan keduanya memiliki kepentingan yang berbeda pula. Dalam gejolak politik Suriah yang masih berlangsung hingga sampai saat ini, Iran mengambil sikap memberikan dukungan politik penuh bagi Rezim Bashar al-Assad. Sikap politik Iran dengan dukungannya untuk Rezim Assad ini karena Suriah telah menjadi salah satu mitra koalisi politik Iran di Timur Tengah sejak revolusi Iran 1979. Oleh karena itu Iran mempunyai kepentingan politik untuk menjaga dan mempertahankan mitra politiknya, terlebih Assad adalah pemimpin dari kalangan Syiah.

Sebaliknya Saudi memberi dukungan bagi kelompok oposisi di Suriah yang bermaksud menggulingkan Assad dari kursi kepresidenan di Suriah. Target Saudi adalah menggulingkan pemimpin dari kelompok Syiah tersebut dan kemudian menggantinya dengan pemimpin dari aliran Sunni, mengingat Suriah adalah negara dengan mayoritas penduduk beraliran Sunni tetapi dipimpin oleh Assad yang menganut paham Syiah.

Harus dicatat bahwa Saudi termasuk negara yang sangat keras mengecam aliran Syiah, sebagai aliran yang dianggap menyimpang dari Islam. Dalam kasus Suriah, Saudi bekerjasama dengan Amerika Serikat dan memperalat Liga Arab untuk mengisolasi Bashar al-Assad dari kancah politik dunia Arab. (Sahide, Gejolak Politik Timur tengah (Dinamika, Konflik dan Harapan), 2017, hal. 162-163)

A. PENINGKATAN KEKUATAN MILITER IRAN

1. Pengembangan Nuklir Iran sejak tahun 1979

Iran sebenarnya sudah mulai mengembangkan kekuatan nuklirnya sebelum Revolusi Islam Iran meledak tahun 1979. Pada era Shah Reza Pahlevi, yang mendapatkan dukungan barat, Iran sudah mulai mengembangkan kekuatan militernya, termasuk senjata nuklir, persisnya sejak tahun 1960-an. Instalasi nuklir Iran pertama adalah untuk penelitian dengan kekuatan hanya 5 Megawatt yang diperolehnya dari Amerika Serikat lantas kemudian mulai beroperasi pada tahun 1967. Betapa pun tercatat dalam dokumentasi sejarah Iran pernah bekerjasama dengan Jerman, perancis untuk mendirikan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik. Akan tetapi setelah Rezim Shah Pahlevi berakhir, proyek pengembangan nuklir tersebut tidak dilanjutkan lagi oleh Amerika, Jerman dan Perancis. Namun Iran tetap bersikukuh mengembangkan megaprojek tersebut (Rahman, 2003, hal. 203-204).

Pergantian Rezim pada tahun 1979, dalam revolusi, membuat proyek perkembangan nuklir Iran tidak berjalan mulus. Barat tidak lagi melihatnya sebagai proyek yang menguntungkan, akan tetapi upaya pembangunan nuklir Iran sudah dilihat sebagai ancaman bagi stabilitas politik di kawasan Timur Tengah yang harus dihentikan. Maka, Dinas Intelijen Amerika (CIA) dan Israel (Mossad) mulai memata-

matai dan menyuplai informasi pada media masa barat dan Israel bahwa Iran memang serius terhadap proyek nuklir. CIA dan Mossad menuduh Iran membangun reaktor nuklir berskala kecil dengan kekuatan masing-masing 20 hingga 30 Megawatt. Dengan latar belakang itulah, di balik Iran terus berupaya mendekati Cina, Pakistan, dan negara Asia Tengah dalam upaya membangun laboratorium nuklir berskala kecil untuk kebutuhan riset ilmiah. Pada tanggal 30 Oktober 1991, Iran disinyalir membeli bahan dari Cina yang bisa memproduksi Uranium. Dalam kasus lain, AS juga mencemaskan penandatanganan hubungan ekonomi Iran - Rusia pada tahun 1991, yang menyebutkan Rusia akan membantu pembangunan 2 reaktor nuklir yang masing-masing memiliki daya 440 Megawatt (Rahman, 2003, hal. 205).

Amerika yang tidak lagi sejalan dengan Iran secara gradual melakukan berbagai opsional untuk mencekal pembangunan nuklir Iran tersebut. Presiden AS Bill Clinton pada tahun 1995 menambah sanksi dengan mengembargo ekonomi total atas Iran dan kemudian mengeluarkan Undang-Undang D'Amato yang isinya melarang perusahaan-perusahaan asing menanamkan modalnya pada sektor perminyakan Iran lebih dari US\$ 40 juta pertahun. Namun sanksi ini tidak dipatuhi, bahkan oleh sekutu Amerika sendiri seperti Inggris dan Perancis yang memiliki investasi besar di bidang energi Iran (El-Gogary, 2006, hal. 324).

Pengembangan nuklir Iran menjadi bagian dari 'krisis politik' di kawasan Timur Tengah dan dunia pada umumnya setelah terjadinya Revolusi Iran tahun 1979 dimana Iran tidak lagi sejalan dengan Amerika dan sekutunya di kawasan Timur Tengah tersebut. Krisis ini semakin memanas setelah Ahmadinejad terpilih sebagai pemimpin politik negeri Mullah

tersebut. Pendahulu Ahmadinejad, Mohammad Khatami sempat menghentikan proses pengayaan Uranium (2003-2005) secara sukarela untuk membuka jalan bagi negosiasi dengan Uni Eropa, yang diwakili Perancis, Inggris dan Jerman.

Suhu politik kembali memanas setelah Ahmadinejad terpilih sebagai presiden Iran. Ahmadinejad dikenal sebagai tokoh beraliran garis keras, langsung melaksanakan program pengayaan Uranium untuk penyediaan energi di Iran. Hal ini langsung mendapatkan respons dari dunia Internasional, dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Juga badan dunia seperti PBB mengeluarkan seruan agar Ahmadinejad menghentikan program nuklir tersebut. Alasan penolakan tersebut adanya kemungkinan Iran akan menciptakan senjata pemusnah massal (Khan, 2007, hal. 324).

Tuduhan ini sebenarnya sudah seringkali dijawab dengan tegas oleh pihak Iran bahwa program pengayaan Uraniumnya bertujuan damai, untuk energi listrik, bukan untuk pembuatan senjata pemusnah massal seperti yang diwacanakan oleh pihak barat dan sekutunya. Namun pihak barat, terutama Amerika dan sekutunya Israel tetap berkeyakinan bahwa program tersebut bertujuan untuk pengembangan senjata nuklir. Meskipun Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang berwenang mengawasi program nuklir di sebuah negara dan terus melakukan inspeksi terhadap situs-situs nuklir Iran, menyatakan tidak ada indikasi Iran sedang melakukan kegiatan nuklir untuk keperluan pembuatan senjata (El-Gogary, 2006, hal. 314).

Amerika yang menganggap bahwa program nuklir Iran merupakan suatu bahaya yang tidak dapat diterima menggunakan berbagai macam cara untuk menjinakkan upaya Iran tersebut. Lembaga internasional, seperti PBB pun dijadikan kendaraan

politik oleh amerika untuk menekan Iran. Oleh karena itu Ahmadinejad sudah sering mendapatkan sanksi dari Dewan Keamanan PBB (El-Gogary, 2006, hal. 313).

Sanksi ini tidak membuat Iran gentar dan berubah sikap. Iran menyadari betul skenario AS itu dengan tujuan bergeming dari pendiriannya. Baginya, bila ia tunduk pada tekanan AS yang menghentikan aktifitas nuklirnya, maka akan ada alasan melemahkan Iran tanpa perlu melakukan serangan militer.

2. Peningkatan Kekuatan Militer Iran di Tahun 2017

Iran yang mendefinisikan doktrin militernya sebagai kekuatan defensif, sepenuhnya independen di bidang ini. Seluruh dimensi kemampuan pertahanan Iran mulai dari senjata ringan hingga senjata strategis seperti rudal dan sistem pertahanan udara, memainkan peran defensif dan tidak dirancang untuk agresi. Tujuan final kekuatan pertahanan dan militer adalah menjaga integritas teritorial dan independensi sebuah negara. Dalam kerangka ini, Republik Islam Iran sudah berhasil melakukannya. Kemajuan berkelanjutan Iran dalam proses diversifikasi kekuatan pencegahan, adalah prioritas agenda kerja institusi militer yang harus didukung pemerintah. Di antara elemen Angkatan Bersenjata Iran, Tentara Nasional Iran memainkan peran signifikan dan disempurnakan oleh Pasukan Garda Revolusi Islam Iran, Pasdaran.

Awal tahun 2017, Presiden Hassan Rouhani mengunjungi Perusahaan Renovasi dan Logistik Helikopter Iran, PANHA dan meresmikan pesawat tempur latihan pertama buatan dalam negeri Iran, Kowsar, pesawat tanpa awak taktis pengintaian yang dilengkapi senjata, Mohajer-6, rudal jelajah anti-kapal, Nasir dan rudal udara ke udara, Fakour. Pesawat tempur latihan pertama buatan dalam negeri Iran, Kowsar dirancang dan dibuat oleh para ilmuwan Pusat

Penelitian Lembaga Industri Udara, Kementerian Pertahanan Iran dengan memanfaatkan kapasitas perusahaan-perusahaan berbasis ilmu pengetahuan dalam negeri. Pesawat yang diproduksi atas pesanan dan dengan partisipasi Angkatan Udara Tentara Nasional Iran ini, sepenuhnya dalam negeri dan selain bisa digunakan untuk melatih para calon pilot, pesawat ini juga mampu melaksanakan tugas-tugas dukungan dekat di udara dan mengangkut berbagai jenis senjata. Ide, desain, produksi, uji coba dan penyesuaian standar pesawat Kowsar, menjadikan Iran masuk dalam satu dari segelintir negara dunia yang memiliki kemampuan merancang dan memproduksi pesawat di kelas ini. Perancangan, sampling dan uji coba peluncuran rudal jelajah anti-kapal, Nasir juga masuk dalam kerangka upaya penguatan kemampuan rudal Angkatan Bersenjata Iran. Rudal darat ke darat ini bisa diluncurkan dari pesisir pantai ke laut untuk menembak target, termasuk kapal perang dan dermaga.

Selain itu, rudal udara ke udara, Fakour yang bisa dipasang di pesawat tempur, mampu menghadapi berbagai jenis ancaman udara dan merupakan rudal udara ke udara pertama Iran. Pada 22 Januari 2017, rudal anti-pesawat jarak jauh, Sayyad-3 juga dipamerkan. Rudal anti-pesawat jarak jauh, Sayyad-3 memiliki banyak kegunaan dalam perang elektronik dan memungkinkan dipakai untuk menyerang target-target dengan lokasi *cross-section* rendah.

Brigjen Farzad Esmaili, Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Khatamul Anbiya Saw mengatakan, teknologi yang digunakan untuk membuat rudal anti-pesawat jarak jauh, Sayyad-3 hanya dimiliki sejumlah kecil negara. Namun para pakar Iran berhasil merancang dan memproduksi rudal ini di masa sanksi dengan bersandar pada kemampuan dalam negeri.

Di hari pertama Pekan Pertahanan Suci, digelar parade militer Angkatan Bersenjata Iran di halaman kompleks Makam Imam Khomeini, Tehran dan dalam acara itu beberapa prestasi militer Iran turut dipamerkan. Rudal Zolfaqar, rudal balistik Khorramshahr, Qiam, Emad dan Sejil, termasuk di antara produk Angkatan Udara Pasdaran yang diluncurkan secara resmi pada 22 Desember 2017. Puncak kekuatan rudal Iran, adalah sistem rudal balistik Khorramshahr yang untuk pertama kalinya dipamerkan dalam parade militer Angkatan Bersenjata Iran di Tehran. Rudal Iran adalah simbol kekuatan Iran yang dipamerkan di tahun 2017 dalam berbagai metode.

Kekuatan rudal pencegahan, adalah bukti kekuatan nyata Iran di Timur Tengah. Serangan rudal Pasdaran Iran ke markas teroris di Deir Ezzor, Suriah, Juni 2017, membuktikan kepada masyarakat dunia bahwa Iran adalah negara yang kuat di bidang rudal. Serangan rudal lintas perbatasan pertama Iran ini adalah jawaban tegas atas musuh (Today, Pars today, 2018, hal. 1).

Berikut ini adalah data yang diambil dari situs Global Fire Power mengenai kekuatan militer Iran pada tahun 2017:

- a. Angkatan Udara. Dengan total kekuatan pesawat 477 unit, pesawat tempur 137 unit, pesawat penyerang 137 unit, pesawat transportasi 203 unit, pesawat pelatih 79 unit, total kekuatan helikopter 126 unit, helikopter serang 12 unit.
- b. Angkatan Darat. Tank tempur 1.616 unit, kendaraan petarung lapis baja 1.315 unit, artileri 2.398 unit, proyektor roket 1.474 unit.
- c. Angkatan Laut. Total aset angkatan laut 398 unit, Frigat 5 unit, korvet 3 unit, kapal selam 33 unit, kapal patroli 230 unit, kapal perang 10 unit. (Power, 2017, hal. 1)

B. PERBANDINGAN KEKUATAN MILITER ARAB SAUDI DAN IRAN

Belum tercatat dalam sejarah Arab Saudi terlibat perang sesungguhnya dengan Iran. Meskipun begitu keduanya tak dipungkiri terlibat dalam perang proxy di sejumlah negara, termasuk di dalam negeri masing-masing. Berikut ini adalah perbandingan kekuatan militer kedua negara:

1. Kekuatan Pasukan

Populasi Iran hampir tiga kali dari Arab Saudi. Dari sini Iran jelas memiliki kelebihan dalam jumlah sumber daya manusia.

Menurut pengamat militer Global Firepower.com, Iran memiliki kekuatan militer 934.000 personel dengan 534.000 personel aktif dan 400.000 cadangan. Sementara Arab Saudi memiliki 256.000 personel dengan 231.000 personel aktif dan 25.000 cadangan. Situs analisis itu mengatakan bahwa terdapat kurang dari 40 juta warga sipil yang bisa dilatih dan dilibatkan jika perang pecah. Sedangkan Arab Saudi memiliki 14 juta orang untuk dipilih dalam keadaan darurat militer.

2. Pesawat Terbang

Meskipun memiliki personel militer lebih kecil, Angkatan Udara Arab Saudi lebih tinggi daripada Iran. Arab Saudi memiliki 790 pesawat terbang, dari jet tempur, pesawat pengangkut dan helikopter militer.

Sementara itu Iran hanya memiliki 477 pesawat terbang, dengan jumlah pesawat pengangkut yang besar. Tidak seperti Arab Saudi yang memiliki lebih banyak pesawat tempur daripada jenis pesawat lainnya.

3. Kendaraan Militer

Arab Saudi memiliki jumlah kendaraan militer yang lebih kecil dari Iran. Arab Saudi memiliki 1.142 tank tempur dan hampir 5.500 kendaraan tempur lapis baja. Sedangkan Iran memiliki lebih banyak tank, dengan jumlah 1.161 armada, tapi hanya 1.315 kendaraan tempur.

4. Artileri

Kontes perang modern tidak banyak di medan pertempuran, sebaliknya berada di ruang kontrol dengan jarak ratusan ribu mil. Dalam hal ini Iran benar-benar melenturkan kekuatan militernya, dengan memiliki 1.474 proyektor roket dan hampir 2.500 jenis artileri. Sedangkan Arab Saudi hanya 322 proyektor roket dan kurang dari 1.000 jenis artileri.

5. Angkatan Laut

Kedua negara tidak saling berbatasan tapi berhadapan satu sama lain di Teluk Persia. Dari sini, kekuatan angkatan laut dua negara merupakan faktor kunci yang harus dipertimbangkan jika terjadi perang habis-habisan. GlobalFirepower.com memperkirakan total angkatan laut Iran adalah 398 aset, yang sebagian besar terdiri dari kapal patroli. Sementara angkatan laut Arab Saudi hanya 55 aset.

6. Anggaran Militer

Anggaran militer Arab Saudi lebih besar dari Iran dengan nominal \$ 56.725.000.000 dibandingkan dengan \$ 6.300.000.000. Anggaran besar karena Arab Saudi membutuhkan pemeliharaan perangkat militer yang jumlahnya lebih banyak daripada Iran (Fuadi, 2017, hal. 1).

Dapat dilihat dari perbandingan yang dikutip dari GlobalFirePowr.Com bahwa Iran lebih unggul daripada Arab Saudi. Oleh karena itu Arab Saudi yang notabennya merupakan saingan dari Iran di kawasan

Timur Tengah mencoba untuk meningkatkan militernya yang direalisasikan dengan cara menggunakan anggaran militernya untuk belanja senjata kepada Amerika Serikat yang sudah menjadi kolega serta produsen dari perlengkapan militer Arab Saudi.

C. USAHA ARAB SAUDI MEMBENDUNG PENGARUH IRAN DI TIMUR TENGAH

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Arab Saudi dan Iran memang merupakan saudara yang tak pernah akur, hal ini dikarenakan banyaknya perbedaan diantara mereka. Arab Saudi dengan paham Sunni nya sedangkan Iran yang menganut paham Syiah. Memang isu keagamaan tersebutlah yang menjadi akar dari permusuhan kedua negara tersebut. Dalam banyak hal persetujuan ini setara dengan Perang Dingin, yang membuat AS dan Uni Soviet bersitegang selama bertahun-tahun. Iran dan Arab Saudi tidak bertempur secara langsung namun mereka terlibat dalam berbagai 'perang proksi' di seluruh wilayah tersebut.

1. Iran di Timur Tengah

Revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979 merupakan salah satu hal yang tidak terduga di tengah terjadinya berbagai konflik di Timur Tengah. Salah satu perkembangan yang paling penting dalam abad ke-21 ini di Timur Tengah adalah tampilnya Iran sebagai salah satu kekuatan regional. Ini bukan hanya semata-mata karena Iran adalah sebuah pemerintah Islam atau karena mampu mengembangkan nuklir, tetapi juga faktor lainnya, baik itu secara geopolitik maupun kedekatan emosional dan kedekatan politis dengan negara-negara di Timur Tengah.

Iran dibawah pimpinan presiden Mahmoud Ahmadinejad memiliki pandangan tersendiri dalam membaca kondisi Dunia Arab. Kemampuan Iran

dalam menunjukkan identitas pun harus diakui cukup hebat.

Tidak bisa dipungkiri, Iran di bawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad menjadi negara paling berpengaruh di Timur Tengah. Belum lagi, kemampuan nuklir Iran yang membuat negara-negara Barat tidak bisa meremehkan. Keberhasilan politik luar negeri Iran dalam dua tahun pertama masa pemerintahan Ahmadinejad dapat ditelusuri di kawasan Timur Tengah. Sistem diplomasi Republik Islam Iran dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimiliki berhasil dalam aksi-aksinya di Irak, Afghanistan, Palestina, Lebanon dan juga Amerika Latin. Kemampuan diplomasi pemerintah Ahmadinejad mengubah Revolusi Islam Iran menjadikan salah satu negara terkuat di Timur Tengah (wibowo, 2011, hal. 1).

Selain itu, Iran juga selalu mengupayakan persatuan dan pengikisan hegemoni Barat atas dunia Islam, serta perlawanan terhadap agresi dan propaganda Barat terhadap umat Islam. Dalam hal ini, dukungan Iran untuk Palestina memiliki posisi istimewa dan mendapat perhatian luas opini publik. Dukungan tersebut membuat masyarakat Palestina menilai Iran sebagai pendukung utama Palestina dan hal ini memperkuat hubungan persaudaraan antara rakyat Palestina dan Iran.

Rakyat Palestina dengan bangga menyinggung hubungan dengan Iran dan peran efektif Republik Islam dalam perimbangan regional serta bantuannya bagi bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Sikap dan kebijakan konstruktif Iran terkait krisis Suriah juga diapresiasi oleh rakyat dan pemerintah Suriah serta para tokoh internasional, termasuk Utusan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini, Staffan de Mistura, utusan Sekjen PBB untuk Suriah, berulang kali menekankan peran

konstruktif Iran dalam krisis Suriah dan dia juga kembali menyampaikan apresiasi kepada Iran atas peran dan diplomasinya menyukseskan gencatan senjata di Suriah.

Iran juga telah mengerahkan seluruh upayanya membantu pemberantasan terorisme, perwujudan gencatan senjata, percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan dan pelaksanaan dialog komprehensif kubu Suriah dengan mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal krisis Suriah Iran menekankan tiga prinsip utama yaitu, penghormatan terhadap tuntutan rakyat Suriah, penentangan intervensi asing, dan penolakan pemanfaatan terorisme sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik.

Sementara itu, Iran selalu memprioritaskan politik luar negeri yang berlandaskan pada peningkatan hubungan konstruktif berdasarkan kepentingan kolektif. Terkait transformasi politik di Irak, Iran juga menunjukkan kinerja berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas nasional negara itu, serta terhadap hak-hak seluruh kelompok di Irak dan Lebanon. Politik Iran adalah mendukung persatuan dan kekompakan negara-negara regional khususnya negara jiran. Lobi para pejabat Iran dan Irak dalam upaya mewujudkan persatuan kelompok-kelompok Irak, juga dalam rangka menyelesaikan krisis politik dan menjaga kedaulatan serta integritas Irak. Pada prosesnya, Iran juga tidak memperhatikan atau mengutamakan kelompok tertentu di Irak. Karena secara keseluruhan, Iran menilai keamanan Irak adalah ketenteraman bagi Republik Islam sebagai tetangga (Today, Pars Today, 2016).

2. Konstelasi Keamanan di Timur Tengah dan Usaha-usaha Arab Saudi dalam Mendapatkan Pengaruh

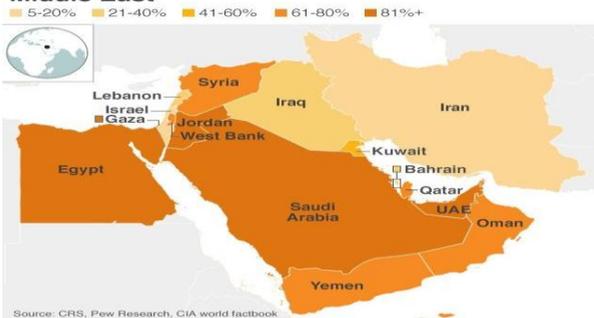
Arab Saudi merupakan sebuah kerajaan serta rumah bagi tempat kelahiran Islam, dapat dilihat

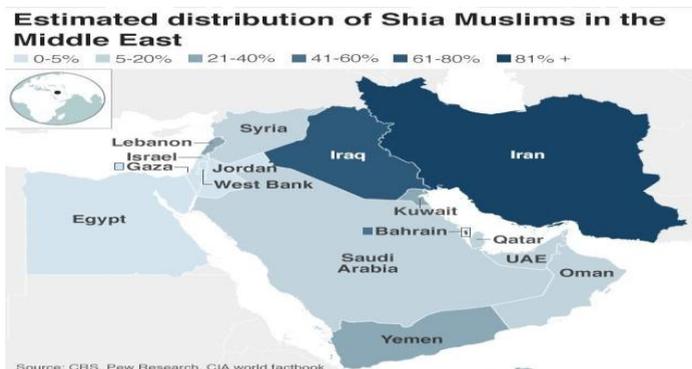
secara historis negara itu merupakan pemimpin dunia Muslim. Namun, pada tahun 1979 hal ini ditantang oleh revolusi Islam di Iran yang menciptakan tipe negara baru di kawasan itu yang bertujuan untuk memperkenalkan paham mereka kenegara-negara di kawasan Timur Tengah.

Arab Saudi dan Iran terlibat dalam persaingan ketat untuk mendapatkan dominasi di wilayah Timur Tengah. Perseteruan puluhan tahun di antara mereka semakin memanas dikarenakan oleh perbedaan paham dalam agama. Mereka masing-masing adalah pengikut salah satu dari dua sekte utama dalam Islam. Arab Saudi menganggap negara mereka sebagai kekuatan Muslim Sunni terkemuka sementara itu sebagian besar masyarakat Iran adalah Muslim Syiah.

Arab Saudi dan Iran sama-sama memiliki pengaruh yang kuat di kawasan timur tengah, hal ini sebagian besar didasari oleh latar belakang kepercayaan negara-negara Timur Tengah yang memang terbagi dua yaitu Sunni dan Syiah. Negara yang pro terhadap Arab Saudi yaitu Mesir, Yaman, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar dan Bahrain. Sementara Irak, Suriah, Lebanon dan Palestina berada di pihak Iran (Shaheen, 2018)

Estimated distribution of Sunni Muslims in the Middle East





Gambar 4.1 (BBC, 2017)

Gambar diatas merupakan perbedaan pengaruh Arab Saudi dan Iran di wilayah Timur tengah. Arab Saudi berusaha mati-matian menahan pengaruh Iran yang meningkat dengan usaha militeristik Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang merupakan penguasa de facto di negara tersebut. Dia melancarkan perang melawan pemberontak di negara tetangga Arab Saudi di bagian selatan, Yaman, untuk menahan pengaruh Iran yang dirasakan di sana, namun setelah hampir tiga tahun, perang ini terbukti sebagai sebuah pertarungan yang mahal.

Sementara di Lebanon, banyak pengamat percaya Saudi memberi tekanan ke perdana menteri untuk mengundurkan diri guna merusak kestabilan negara sekutu Iran, basis kelompok milisi Syiah Hizbullah, mengarah ke blok yang memiliki kekuatan politik dan mengendalikan sebuah pasukan tempur bersenjata berat.

Ada juga kekuatan eksternal yang bermain. Arab Saudi didukung oleh administrasi Trump juga mendukung upaya Saudi untuk menahan Iran. Arab Saudi dan Amerika Serikat adalah dua negara yang paling tegas menolak perjanjian internasional pada 2015 yang membatasi program nuklir Iran, bersikeras

bahwa hal itu tidak cukup untuk menutup kemungkinan Iran menciptakan bom nuklirnya (BBC, 2017, hal. 1).

Baik Saudi maupun Amerika Serikat sepakat untuk menghentikan pengaruh Iran di Timur Tengah. Saudi pun telah terang-terangan menyebut kesepakatan nuklir Iran sebagai kesepakatan yang salah. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penjualan senjata besar-besaran bernilai 110 miliar dollar kepada Arab Saudi dalam kunjungannya yang pertama ke luar negeri sejak menjadi presiden. Kunjungan ini merupakan pernyataan terbuka kepada Iran tentang komitmen Washington kepada Arab Saudi sebagai pusat kekuatan regional (staff, 2017, hal. 1).